

TAJUK RENCANA Boleh Mudik

NYICIL ayem. Mungkin itu ungkapan bahagia yang dirasakan para perantau saat ini. Bahkan bukan hanya para perantau, para anggota keluarga di kampung halaman yang ditinggal merantau. Bagaimana tidak, pada lebaran tahun lalu mereka tidak bisa kumpul bersama. Sebab para perantau dilarang mudik. Mereka yang tidak berada di rantau pun tidak bisa saling bersilaturahmi sebagaimana lazimnya saat lebaran, karena sedang terjadi pandemi virus Corona (Covid-19).

Kini, meski lebaran masih sekitar dua bulan lagi, sudah ada informasi pemerintah tidak melarang mudik. Artinya, para perantau boleh mudik. Namun demikian dengan catatan, mereka tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, sehingga mudik tidak menjadi sarana penyebaran dan penularan virus Corona, mulai keberangkatan dari rantauan sampai kedatangan di kampung halaman. Tentu saja prokes juga harus diterapkan saat berada di kampung halaman. Juga ketika balik ke tempat perantauan. Harapannya, kondisi fisik tetap sehat, tidak tertular virus Corona. Jika membawa virus tersebut juga tidak menularkan kepada orang lain.

Mudik memang sudah menjadi tradisi bangsa Indonesia bertahun-tahun setiap lebaran. Masyarakat merasa *gothang* atau tidak sempurna kalau lebaran tidak bisa berkumpul bersama keluarga dan handai taulan. Karena itu, meski sedang berada jauh di rantau, tetap berusaha untuk bisa pulang kampung, meski harus menempuh perjalanan jauh dengan susah payah dan biaya tidak sedikit.

Kata mudik, yang berasal dari kata "udik" yang artinya selatan/hulu dan oleh KBBI disinonimkan dengan istilah pulang kampung, merupakan kegiatan perantau/pekerja migran untuk pulang ke kampung halamannya. Di Indonesia, mudik identik dengan tradisi tahunan yang terjadi menjelang hari raya besar keagamaan, misalnya menjelang Lebaran.

Saat itulah masyarakat dari perantauan berkumpul dengan sanak saudara, juga untuk sungkem kepada orangtua.

Karena saat ini masih masa pandemi, maka meski tidak ada larangan mudik namun upaya untuk terus melawan virus corona tetap tidak boleh kendor. Sebab, pemudik bisa saja membawa virus Corona yang bisa saja mereka dapat di mana saja. Kalau itu terjadi maka bisa menyebarkan virus Corona di kampung halaman. Karena itu tepat sekali kalau tetap menerapkan prokes secara ketat sejak keberangkatan, yakni menerapkan 5 M (memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi).

Di kampung halaman warga sekitar juga harus berperan aktif agar tidak terjadi penularan dan penyebaran virus Corona. Terkait hal ini anggota DPD RI wakil DIY, GKR Hemas menekankan peran jaga warga di DIY harus dioptimalkan. Jika ada keluarga dari luar daerah harus dimintai surat keterangan sehat.

Sedang dari Pemda DIY sendiri, sebagaimana diungkapkan Sekda K Baskara Aji, akan meningkatkan skrining pelaku perjalanan di pintu-pintu masuk DIY, baik di stasiun, bandara, maupun jalan raya. Skrining juga akan dilakukan di posko-posko yang ada di tingkat kelurahan dan RT. Pergerakan orang, terutama yang belum bisa membuktikan dirinya sehat melalui rapid tes antigen atau Tes PCR.

Kita berharap, tradisi mudik lebaran nanti bisa berjalan lancar dan aman. Para pemudik tidak mengalami insiden sejak keberangkatan sampai kedatangan. Tidak menyebabkan terjadinya lonjakan kasus Covid-19, bahkan kasus terus menurun. Para pemudik dan keluarganya senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat sehingga mereka bisa berbahagia bersama-sama. □

Keindahan, Kekuatan Baru Desa

Kharis Ragil Triyanto

Peranserta pemerintah daerah dan pusat dalam mengembangkan sumber daya keindahan ini pun harus dirumuskan dalam perencanaan pembangunan wilayah secara bersinergi dan berkelanjutan. Pihak swasta sangat berpeluang juga untuk dilibatkan dalam pengembangan sumber daya keindahan ini. Apalagi dengan adanya peraturan



KR-JOKO SANTOSO

perundang-undangan untuk kemudahan berinvestasi, sumber daya keindahan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dan desa.

Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat merupakan salah satu strategi dalam mengelola sumber daya keindahan. Tak jarang, akibat dari potensi ini beberapa desa berebut dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengembangan wisata. Sebelum adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tempat wisata rata-rata dikelola pemerintah daerah. Setelah Undang-Undang Desa berlaku, beberapa desa melihat wisata dapat menjadi sumber pendapatan desa.

Melirik
Sumber daya keindahan yang dikelola dengan bijak tentunya akan berdampak terhadap pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan. Dibukanya destinasi wisata baru akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berwirausaha. Desa-desa yang tadinya kebingungan ingin mengembangkan potensi apa, sekarang dapat mulai melirik pengembangan sumber daya keindahan ini. Bukan hal yang tak mungkin sumber daya keindahan ini menjadi kekuatan desa dalam menggerakkan perekonomiannya. Permasalahan yang timbul akibat tarik menarik siapa pengelola wisata juga harus dirumuskan solusi yang menguntungkan semua pihak.

Tidak kalah penting harus dipikirkan dalam pengelolaan sumber daya keindahan ini adalah kesiapan pengelola ketika jumlah pengunjung di atas kapasitas. Mengingat zaman sekarang teknologi komunikasi dan informasi semakin maju, sehingga tempat wisata baru cepat sekali ramai dikunjungi wisatawan. Tempat wisata yang terlalu ramai bisa membuat pengunjung kurang nyaman. Terlalu banyak pengunjung juga akan berdampak terhadap jumlah sampah yang dihasilkan. Memang sumber daya keindahan ini dapat menjadi kekuatan desa. Desa juga harus kuat dalam mengelolanya. □

**) Kharis Ragil Triyanto, analisis kebijakan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Gelar Dangdut dan Pilihan Politik

Manaf Maulana

MEMPERHATIKAN berita keluh kesah seniman musik dan biduan dangdut karena tidak bisa pentas selama Pandemi Covid-19, rasanya miris. Namun pikiran lantast akan terkenang pada pesta keluarga dan kampanye politik yang identik dengan pentas dangdut. Dalam hal ini, dangdut sengaja dipentaskan untuk menarik perhatian masyarakat. Tanpa dangdut, pesta keluarga dan panggung kampanye politik dapat dipastikan bakal sepi.

Hal ini tampaknya sudah diyakini semua politisi di negeri ini. Keyakinan tersebut bahkan semakin massif. Bisa dikatakan, tidak ada pesta keluarga dan kampanye politik tanpa dangdut. Bahkan, partai kecil yang tak mampu membayar orkes serta penyanyi dangdut untuk meramaikan kampanyenya, terpaksa menyetel lagu-lagu dangdut dengan sound sistem yang bersuara sangat keras.

Karena kampanye identik dengan pentas dangdut, banyak orkes dan penyanyi dangdut yang panen rezeki sepanjang masa kampanye. Job manggung bagi mereka bahkan bisa lebih dari satu kali dalam sehari. Yang terkenal, sering menjadi rebutan partai.

Mahal Kontrak

Hukum pasar berlaku. Banyak orkes dan penyanyi dangdut kemudian menaikkan tarif selama masa kampanye. Orkes dan penyanyi dangdut yang punya banyak penggemar dapat dipastikan semakin mahal kontraknya. Meski demikian, orkes dan penyanyi dangdut yang mahal justru menjadi rebutan partai, karena semua partai memang berlomba-lomba menarik perhatian rakyat.

Bahkan, rakyat yang sudah mantap golput juga bisa saja senang mendatangi acara kampanye hanya karena semata-mata ingin menyaksikan pentas orkes dan penyanyi dangdut idolanya dengan gratis. Atau, banyak rakyat yang sudah tercatat menjadi kader partai A misal-

nya juga meramaikan kampanye partai-partai lain gara-gara sudah telanjur menjadi penggemar berat orkes dan penyanyi dangdut.

Paparan di atas merupakan deskripsi tentang fenomena dangdutisasi politik di negeri ini. Kini semua gara-gara Pandemi Covid-19. Pilkada yang baru lalu pun sepi job bagi mereka.

Fenomena dangdut dan politik tampaknya identik dengan fenomena massa mengambang. Banyak rakyat di negeri ini memilih untuk tidak terang-terangan mendukung partai, caleg dan kandidat pemimpin tertentu. Tujuannya, bisa leluasa dan nyamana menikmati pentas dangdut di panggung kampanye yang digelar semua partai.

Bagi rakyat, menjadi massa mengambang lebih menguntungkan dibanding menjadi kader dan simpatisan partai dan calon tertentu. Misalnya, karena mengambang maka bisa saja menerima kaos dan sembako yang dibagi-bagikan semua partai dan kandidat pemimpin.

Dalam sistem demokrasi, massa mengambang ibarat wilayah yang menjadi rebutan semua kekuatan politik. Itulah sebabnya kampanye terbuka dengan menggelar pentas dangdut menjadi pilihan semua kekuatan politik. Pada titik ini, makna kampanye betul-betul penting karena targetnya adalah massa mengambang. Berbeda dengan kampanye tertutup khusus kader dan simpatisan partai, yang sudah tidak bisa lagi dimaknai sebagai kampanye melainkan lebih tepat disebut sebagai konsolidasi partai.

Politik Aliran

Tapi, benarkah massa mengambang bisa dirayu dengan pentas dangdut agar bersedia memilih partai atau kandidat pemimpin tertentu? Jawabannya bisa merujuk hasil pemilu dan pilkada.

Merujuk data empiris, partai menggelar kampanye yang dihadiri paling banyak massa mengambang karena selalu menampilkan pentas dangdut paling populer ternyata menjadi partai pemenang pemilu dan pilkada. Data empiris tersebut tampaknya bisa menjadi bukti nyata berakhirnya politik aliran atau matinya ideologi-ideologi primordial. Maka, sia-sia saja jika masih ada partai yang ingin menang dengan hanya mengandalkan politik aliran dan ideologi-ideologi primordial. Faktanya yang menang karena didukung penggemar dangdut yang nota bene mayoritas rakyat.

Namun temuan lain bisakah menjadi fakta pula. Karena dangdut sedang absen gara-gara Pandemi Covid-19, politik aliran mungkin bagaimana mendapat angin segar untuk berkembang. □

**) Manaf Maulana, peneliti budaya politik dari Kudus*

Pojok KR

HMI bisa jadi lokomotif kemajuan bangsa.
- Kiprah dan pengabdianmu selalu ditunggu.

Penting, edukasi setelah divaksin.
-- Bukan berarti sudah tidak bisa sakit.

Waspada pemalsuan buku nikah.
-- Kalau nikah resmi pasti aman.

Berabes

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Pandemi dan Pendidikan

PANDEMI Covid-19 sudah berlangsung satu tahun. Salah satu dampak yang memprihatinkan adalah dalam bidang pendidikan. Pelajar di seluruh Indonesia mau tidak mau harus mengikuti pembelajaran secara daring.

Pembelajaran secara daring memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya anak-anak kita aman tidak tertular virus. Tugas yang diberikan guru pun bisa dikerjakan dalam waktu yang langgar. Adapun dampak negatifnya, banyak anak yang tidak bisa lepas dari smartphone. Smartphone tidak hanya digunakan untuk belajar tapi malah digunakan untuk bermain game secara terus-menerus.

Dari sisi kesehatan, radiasi smartphone bisa menyebabkan kebutaan dan otak juga tidak bisa memiliki konsentrasi. Anak tidak bisa mencerna kalimat perintah, ajakan dari orang tua dan guru. Perilaku anak juga menjadi brutal, malas untuk melakukan aktivitas apapun, apalagi jika diminta untuk mengerjakan tugas.

Para guru juga faham kejenuhan murid-muridnya karena sudah satu

tahun pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Para guru juga sudah berusaha untuk membuat strategi pembelajaran agar anak tidak jenuh dengan tugas dan materi yang setiap hari harus dikerjakan.

Sebenarnya tidak hanya murid yang merasakan kejenuhan tapi orang tua juga, karena tidak semua orang tua memiliki kemampuan dalam mendampingi menyelesaikan tugas dari sekolah. Selain itu, masalah kuota juga menjadi kendala bagi orang tua yang keadaan ekonominya pas-pasan.

Banyak orang tua dan anak yang menginginkan untuk sekolah seperti semula. Tapi keadaan membuat keinginan mereka belum bisa diwujudkan. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi bisa hilang dari negeri kita. Kita hanya bisa berusaha untuk menaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Selain itu, kita juga harus banyak berdoa kepada Allah SWT agar pandemi segera berlalu. □

**) Novi Kirana SPd, Guru SMAIT Ibnu Abbas, Beluran, Sidomoyo, Godean, Sleman.*

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochman. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langanan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrkryk@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486. **Penerbit:** PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945. **Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984). **Penerbit:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan **Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rekening: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja. **Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto. **Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.